

## AGENDA POLITIK GERAKAN ISLAM BARU

**M. Imdadun Rahmat**  
 Koordinator Bidang  
 Penerbitan dan Informasi  
 PP Lakpesdam  
 dan Redaktur Pelaksana  
 Jurnal Tashwirul Afkar



**Khamami Zada**  
 Koordinator Bidang  
 Penelitian dan Kajian  
 PP Lakpesdam dan  
 Redaktur Jurnal Tashwirul  
 Afkar

Sejak abad akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Islam kembali menemukan semangat kebangkitannya setelah lama terkungkung oleh kolonialisme dan imperialisme Barat. Kebangkitan Islam ditandai oleh lahirnya sejumlah pemikir kenamaan, seperti Thahthawi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammadi Iqbal, dll. yang secara teoritis telah melakukan perubahan besar terhadap paradigma umat Islam, yang ketika itu tenggelam oleh

kebodohan dan kemunduran. Ide pembaharuan yang dilontarkan oleh para pemikir Muslim telah menggugah kesadaran untuk maju dan berani melakukan kreasi dan inovasi besar dalam tradisi Islam modern.

Era selanjutnya adalah era membangun gerakan yang lebih riil dalam perjuangan Islam modern. Sejak tahun 1930-an, Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwan al-Muslimin di Mesir, Abu A'la al-Mawdudi (1903-1979), pendiri partai Jamaat-i Islami yang berlatar belakang India-Pakistan dan juga pemikiran politik Syiah revolusioner, seperti Ayatullah Khomeini, Baqir al-Sadr, dan Taliqani<sup>1</sup> memulai gerakan pemikiran baru yang berupaya mendefinisikan Islam sebagai sistem politik. Mereka memberikan legitimasi pada visi baru ini dengan tema kembali ke nash-nash serta inspirasi masyarakat Muslim awal. Gerakan kontemporer yang memandang Islam sebagai ideologi politik inilah yang selanjutnya sering disebut "Islamisme".<sup>2</sup> Islamisme muncul sebagai gerakan yang memandang Islam sebagai ideologi politik.

Olivier Roy membagi Islam dalam tiga kecenderungan geografis dan kultural: Timur Tengah-Arab-Sunni, anak benua

<sup>1</sup> Olivier Roy, *The Failure of Political Islam*, London: I.B. Tauris Publishers, 1994, hlm 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. ix. Lihat pula penjelasan L. Carl Brown tentang tiga sosok; al-Banna, al-Mawdudi, dan Sayyid Qutb dalam *Religion and State: the Muslim Approach to Politics*, (Columbia University Pers, 2000), hlm. 139-142.

India-Sunni, serta Iran-Arab-Syiah.<sup>3</sup> Dari ketiga kecenderungan ini, Islamisme meluas ke Asia Tenggara sebagai bagian dari pergerakan Islam modern mengingat kecenderungannya yang meningkat sejak awal abad ke-21, terutama setelah perubahan politik yang terjadi di Indonesia dan Malaysia.

Indonesia menjadi panggung sentral dari pergerakan Islam di Asia Tenggara, yang melahirkan banyak gerakan Islamisme, baik yang bersifat politik maupun kultural. Jaringan yang dimiliki oleh gerakan Islamisme di Indonesia tidak jauh berbeda dengan gerakan yang berada di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, Mesir, Pakistan, dan Afghanistan. Ini berarti ada jaringan yang menghubungkan antara gerakan Islam di Asia Tenggara-Melayu-Sunni (Indonesia) dengan dua kecenderungan geografis lainnya, yakni Timur Tengah-Arab-Sunni dan anak benua India-Sunni.

### Fenomena Islamisme, “Gerakan Islam Baru”

Reformasi politik yang digulirkan sejak lengsernya Presiden Soeharto 1998 membuka kebebasan mengekspresikan hak sipil dan hak politik bagi seluruh rakyat. Kebebasan ini memungkinkan kalangan gerakan Islam untuk leluasa

menyatakan pendapat, membentuk organisasi, memilih asas/ideologi dan platform, melakukan berbagai kegiatan dakwah dan terjun dalam aktivitas politik. Sesuatu yang tak pernah terjadi pada masa rejim Soeharto karena ‘depolitisasi massa’ dan ‘asas tunggal Pancasila’. Maka bermunculanlah organisasi-organisasi Tarbiyah (yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Front Pembela Islam, Laskar Jihad (Gerakan Salafi) dan organisasi-organisasi kelas-karan yang muncul di berbagai daerah.

Gerakan berbagai organisasi ini ditengarai berada di luar *mainstream* praktik politik maupun wacana gerakan Islam dominan (NU dan Muhammadiyah). Mereka memiliki sejarah geneologi pemikiran, basis ideologi, dan strategi gerakan yang berbeda dengan organisasi-organisasi lama yang telah eksis sebelumnya. Maka dalam tulisan ini organisasi-organisasi di atas disebut “gerakan Islam baru” (*new Islamic movement*)<sup>4</sup>. Karakter yang sering dilekatkan dengan gerakan Islam baru ini antara lain lebih militan, radikal, skripturalis, konservatif, eksklusif, berhaluan keras dan menjadikan politik sebagai bagian dari keyakinan agama.

Kemunculan gerakan Islam baru ini di satu sisi menumbuhkan revitalisasi ni-

<sup>3</sup> Olivier Roy, *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Istilah yang belum populer ini penulis gunakan untuk merujuk organisasi-organisasi Islam yang muncul pasca Reformasi dengan pertimbangan bahwa berbagai organisasi tersebut memiliki corak ideologi, pemikiran, karakter dan strategi gerakan yang berbeda-beda. Yang mempersamakan adalah bahwa mereka *baru* lahir pada masa reformasi dan sama-sama menampilkan corak yang *baru* dan berbeda dengan gerakan Islam yang telah ada.

lai-nilai moral dan ritual keislaman, namun di sisi lain menimbulkan berbagai masalah. Sebagai dampak dari eksklusivitasnya arus baru ini acap kali menimbulkan ketegangan sosial berkaitan dengan keragaman paham keagamaan di dalam Islam sendiri maupun pluralitas agama. Kecenderungan memonopoli kebenaran agama dalam kelompok ini membuat mereka tidak toleran kepada pemahaman Islam yang lain maupun agama lain. Pandangan agama yang konservatif dan skripturalis sering kali berbenturan dengan kalangan Islam progresif dan asas kebebasan penafsiran terhadap doktrin agama. Sikap militan dan pendekatan yang radikal mendorong mereka ke arah ekstremisme (*tatharrufiyah*) dan kekerasan (*al-unfiyyah*). Sedangkan menjadikan Islam sebagai ideologi politik melahirkan ketegangan dengan kenyataan *nation state* dan asas pancasila sebagai *common platform* bernegara.

Problem di atas layak untuk menjadi perhatian kita ketika arus ini telah berkembang menjadi kekuatan politik yang semakin membesar. Naiknya perolehan suara PKS yang mencengangkan menjadi bukti akan fenomena ini. PKS merupakan proponent utama dari gerakan Islam baru ini dan ada indikasi kuat bahwa PKS menjadi kanal politik dari kelompok sehaluan seperti FPI, MMI dan gerakan Salafi. Tulisan ini hendak melihat bagaimana kekuatan politik baru ini bermain dalam kancah politik dan mendesak warna baru posisi Islam dalam negara nasional kita.

## Akar Gerakan; Teori "Satu Susuan"

Secara historis, kemunculan dan eksistensi kelompok yang cenderung keras dan radikal di kalangan umat Islam Indonesia bukanlah hal yang sama sekali baru. Pada awal abad ke-20, dalam peningkatan semangat nasionalisme dan deprivasi ekonomi yang kian parah di kalangan pribumi, radikalisme muslim diperankan oleh kelompok-kelompok Sarekat Islam (SI) lokal. Seperti diperlihatkan sejarawan Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo dalam beberapa kajiannya, radikalisme SI lokal menunjukkan amalgamasi "ideologi" revivalisme Islam; Mahdiyyisme atau Ratu Adil; dan anticolonialisme. Eskatologisme, dengan demikian, sangat kentara dalam gerakan-gerakan SI lokal, dan semacamnya.

Eskatologisme gerakan radikal muslim kelihatan makin surut pada masa-masa selanjutnya, untuk digantikan ideologi politik Islam. Hal inilah yang bisa dilihat dalam gerakan Darul Islam di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat (Kartosuwiryo), Sulawesi Selatan (Abdul Kahar Muzakkar) dan Aceh (Daud Beureh) pada masa paskakemerdekaan.

Pada masa Soeharto 1980-an juga dikenal adanya kelompok-kelompok muslim garis keras, seperti kelompok Imron, Salman Hafidz, dan Warsidi, yang biasa disebut secara keseluruhan oleh aparaturnya sebagai "Komando Jihad". Eskatologisme Islam juga nyaris absen dalam gerakan-gerakan radikal ini. Hal ini disebabkan gerakan-gerakan ini bukanlah gerakan yang melibatkan massa

dalam jumlah sangat besar. Banyak pengamat percaya, setidaknya sebagian dari kelompok garis keras pada masa Soeharto merupakan bentukan atau rekayasa dari rezim dan aparat keamanan yang *hostile, bermusuhan, terhadap Islam untuk mendiskreditkan Islam secara keseluruhan*. Sikap pemerintah yang terlalu keras kepada umat Islam memang dengan mudah membenihkan radikalisme di mana-mana.

Meskipun sebagian organisasi pendukung "gerakan Islam baru" semisal MMI merupakan kontinuitas dari gerakan radikal sebelumnya, namun sebagian besar merupakan fenomena baru yang tak memiliki akar kesejarahan di Indonesia. PKS, Hizbut Tahrir dan Laskar Jihad merupakan gerakan yang berakar dari pergulatan gerakan Islam di Timur Tengah. Transmisi ini terjadi sejak awal 1980-an. Bersamaan dengan "politik akomodasi Islam" yang dilakukan Soeharto, inspirasi dan pancaran gerakan dari Timur Tengah ke Tanah Air membentuk peningkatan gairah kesantunan di tengah masyarakat. Terdapat peningkatan perhatian terhadap ajaran-ajaran agama seperti perintah meramaikan mesjid dengan berbagai pengajian, kewajiban sembahyang, puasa, haji, pengembangan berbagai program dan publikasi-publikasi keagamaan. Ini juga diikuti oleh meningkatnya

praktik nilai-nilai Islami dalam kehidupan sehari-hari termasuk pemakaian busana muslim dan revitalisasi sufisme. Arus Islamisasi ini juga merambah di kalangan pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, bisnis, dan dunia pendidikan.

Sebagai sebuah gerakan, munculnya ekspresi revivalisme Islam di Indonesia pada era sekarang ditandai oleh lahir dan berkembangnya Lembaga Dakwah Kampus (LDK) pada awal 1980-an. Gerakan dakwah yang dimotori kalangan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi umum ini merupakan cikal-bakal dari lahirnya gerakan Islam baru yang menonjol yakni Tarbiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, MMI dan Laskar Jihad.

Embrio LDK terbentuk di Masjid Salman ITB yang dipelopori Imaduddin Abdulrahim. Berbagai pelatihan dakwah LDK Masjid Salman diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jawa dan para alumninya mengembangkan lembaga yang serupa di kampus masing-masing. Lembaga di berbagai kampus ini menyelenggarakan pelatihan dakwah semacam itu dengan mentor para aktifis LDK yang lebih senior, diikuti oleh mahasiswa di kampus masing-masing serta dari kampus yang lain. LDK menyebar ke berbagai perguruan tinggi ke seluruh Indonesia dengan pola ini.<sup>5</sup>

Hingga akhir 1980-an LDK menjadi

<sup>5</sup> Menurut Nurhayati Djamas, sistem dakwah dan pengkaderan masjid Salman ITB mewarnai sistem di mesjid-mesjid kampus yang lainnya. Hal ini dimungkinkan karena para penggagas gerakan dakwah kampus di perguruan tinggi lainnya ditengarai merupakan alumni LMD masjid Salman. Sejak penyelenggaraannya yang pertama pada tahun 1974, hingga tahun 1989 LMD telah dilakukan sebanyak 71 kali. Penyelenggaraan LMD ini tidak terbatas di Bandung tetapi juga di Jakarta, Yogyakarta, Medan



tempat belajar dan berdakwah para aktivis yang kemudian menjadi pelopor gerakan Tarbiyah, HTI, MMI maupun Laskar Jihad. Jaringan dakwah kampus digunakan secara bersama-sama oleh berbagai gerakan ini. Pada masa itu, materi yang disampaikan dalam pelatihan ini masih bersifat umum. Namun ada warna dan corak keagamaan yang menonjol antara

lain: *pertama*, reformatif, yakni pemurnian pemahaman Islam dari pengaruh unsur-unsur luar Islam baik dari pemikiran Barat maupun dari tradisi-tradisi lokal. *Kedua*, corak kesadaran diri untuk keluar dari dominasi dan isolasi kekuatan di luar Islam, terutama Barat. *Ketiga*, corak pertumbuhan kepercayaan diri untuk tampil sebagai salah satu kekuatan alternatif yang membawakan penyelesaian atas problem-problem yang dihadapi umat manusia. Kepercayaan ini berangkat dari premis "Islam sebagai alternatif". Oleh karena itu, Islam harus dibumikan dalam kehidupan nyata sehari-hari.<sup>6</sup>

Menurut penelitian Ali Said Damani, LDK merupakan cikal bakal lahirnya gerakan Tarbiyah yang kemudian berkembang menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Demikian juga dengan HTI. Menurut Ismail Yusanto, juru bicara Hizbut Tahrir, pada masa-masa awal, HTI disebarluaskan ke seluruh Indonesia melalui jaringan komunikasi dakwah kampus.

Menurutnya lagi, sistem dan cara yang digunakan para aktivis gerakan Islam yang kemudian membentuk, Tarbiyah, HT, MMI dan Laskar Jihad sebenarnya sama. Berangkat dari LDK, lalu membentuk *usroh-usroh*. Letak perbedaannya ada pada jenis pemikiran yang dikembangkan. Bagi kalangan Tarbiyah

---

dan berbagai daerah lain. Bahkan, pada LMD pertama, telah diikuti oleh mahasiswa dari Jakarta dan Yogyakarta. Alumni-alumni LMD inilah yang mengembangkan kegiatan serupa di masjid kampus masing-masing. Lihat Abdul Aziz, ed., "Gerakan Kontemporer Islam Indonesia", Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989, hlm. 267.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

mereka mengembangkan pemikiran para tokoh Ikhwanul Muslimin, sedangkan di kalangan Hizbut Tahrir mengembangkan pemikiran Hizbut Tahrir sendiri. Karena materi pengkaderannya berbeda, maka pemikiran, orientasi dan langkah pendukung berbagai gerakan ini berbeda.<sup>7</sup>

Menurut Nuim Hidayat, aktivis senior HTI, bahwa HTI melebur dengan kelompok dan pemikiran yang lain dalam wadah bersama yakni Lembaga Dakwah Kampus. Dalam pelatihan ini, materi, nara sumber, maupun peserta berasal dari berbagai kelompok gerakan dakwah yang ada. Materi yang disampaikan tidak khusus materi pengkaderan Tarbiyah atau Hizbut Tahrir. Namun, sejak sekitar 1988, dalam tubuh LDK mulai muncul bibit-bibit perpecahan antar faksi Hizbut Tahrir dan Tarbiyah. Sehingga, pada masa-masa berikutnya masing-masing kelompok ini mengembangkan jaringan sendiri-sendiri. Mereka juga mulai menyusun materi pengkaderan yang benar-benar sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing.<sup>8</sup> Dengan demikian LDK merupakan "ibu susuan" yang membesarkan Tarbiyah, HTI, MMI, dan Laskar Jihad. Hal ini masuk akal sebab, pada masa-masa awal, selain mengetengahkan pemikiran IM yang menjadi acuan kalangan Tarbiyah,

LDK juga mengakomodasi banyak tokoh-tokoh Islam dari berbagai kalangan dengan metodologi yang relatif cair dan hanya diikat pada kesamaan visi dan misi.<sup>9</sup>

Dari sisi pemikiran, gerakan Islam Baru ini dapat dilacak asal-muasalnya dari berbagai organisasi gerakan Islam di Timur Tengah. Yang nyata-nyata mengimpor pemikiran dari Timur Tengah adalah gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahrir Indonesia dan Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jama'ah. Gerakan Tarbiyah pemikirannya sangat dekat dengan IM, Hizbut Tahrir Indonesia bahkan secara resmi merupakan cabang dari HT internasional yang berpusat di Yordania.<sup>10</sup> Sedangkan Laskar Jihad adalah himpunan dari para aktifis dakwah Salafi yang berjejaring dengan gerakan Salafi di Timur Tengah khususnya Arab Saudi dan Kuwait.

Mengenai Majelis Mujahidin Indonesia, terdapat analisa kontroversial yang diajukan Sidney Jones bahwa organisasi ini memiliki keterkaitan dengan jaringan Jama'ah Islamiyah di Asia Tenggara dan memiliki kontak dengan Osama Bin Laden dan Alman Al-Tawakhiri. Alman adalah pemimpin Jama'ah Islamiyah Mesir yang bergabung ke Al-Qaidah.<sup>11</sup> Jika hal ini benar, maka sangat dimungkinkan, selain berbasis ideologi Negara Islam In-

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ismail Yusanto tanggal 9 Juni 2003.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nuim Hidayat tanggal 29 Juni 2003.

<sup>9</sup> Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, hlm. 99-100.

<sup>10</sup> Syamsu Hilal, "Gerakan Dakwah Islam Di Indonesia", Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 2002, hlm. 116-119.

<sup>11</sup> Sidney Jones, "Al-Qaida in Southeast Asia: The Case of the "Ngruki Network" in Indonesia", artikel dalam situs International Crisis Group, edisi 8 Agustus 2002.

Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia juga memiliki keterkaitan pemikiran dan ideologi dengan Jama'ah Islamiyah di Mesir. Namun, hal ini dibantah oleh Majelis Mujahidin Indonesia.<sup>12</sup>

Sedangkan FPI, lebih merupakan organisasi yang muncul dari para ulama, dai, dan habaib yang memiliki ciri Islam tradisional. Mereka mempraktikkan ritual-ritual yang ditentang oleh para pendukung gerakan Tarbiyah, Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia maupun Laskar Jihad, yang mengusung purifikasi dan secara pemikiran dekat dengan Timur Tengah. Kalangan FPI akrab dengan tahlil, berzanji, shalawat, dan puji-pujian yang sering diidentikkan dengan bid'ah.<sup>13</sup> Dapat disimpulkan bahwa FPI tidak memiliki hubungan pemikiran yang khusus dengan pemikiran revivalisme Timur Tengah kontemporer.

Berbagai gerakan ini telah tumbuh menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam kancah gerakan Islam di Indonesia. PKS telah berkembang menjadi partai yang tumbuh dengan cepat. Saat ini, PK-Sejahtera memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW = setingkat propinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (DPD = setingkat kota/kabupaten), dan di 2155 Dewan Pimpinan Cabang (DPC = setingkat kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, PK-Sejahtera juga memiliki 13 perwakilan di luar

negeri yang disebut dengan Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PI-PKS). PK-Sejahtera memiliki 300.000 kader inti.

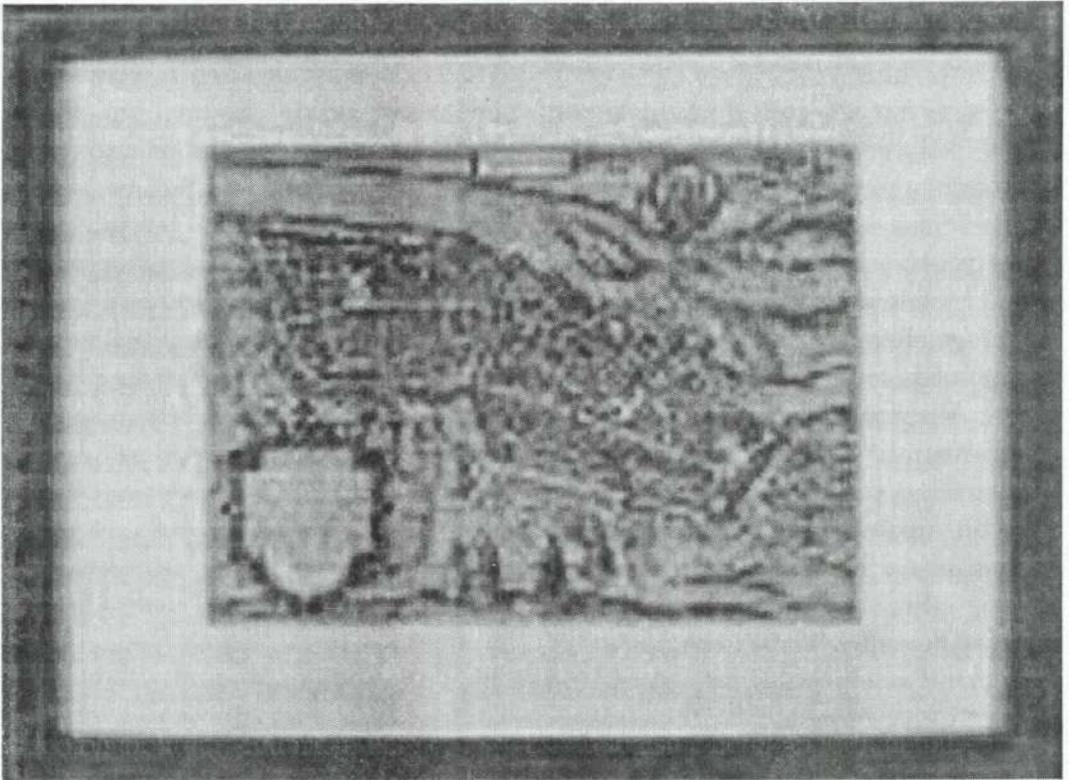
HTI telah berkembang pesat tidak hanya di kalangan komunitas kampus, tetapi telah berkembang di pabrik-pabrik, pesantren, sekolah, perkantoran, mesjid, kompleks perumahan bahkan ormas. Menurut Ismail Yusanto, HTI telah tersebar ke 20 propinsi dengan jumlah anggota kurang-lebih sepuluh ribu orang. Dengan anggota terbanyak terdapat di Jakarta, menyusul Jawa Timur, DIY, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan di luar Jawa anggota terbanyak terdapat di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Saat ini penyebaran HTI tidak lagi terbatas di kota-kota besar tetapi sudah berkembang di kota-kota kabupaten, bahkan telah masuk ke desa. (Wawancara dengan Ismail Yusanto).

Sedangkan MMI, Laskar Jihad dan FPI memiliki pengaruh yang cukup luas di berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta dan Ambon. Dua organisasi yang disebut awal memiliki pengikut yang sangat militan dan acap kali melakukan manuver-manuver yang berdampak luas dalam kehidupan keagamaan dan politik di Indonesia.

Pendukung "gerakan Islam baru" sesungguhnya minoritas jika dibandingkan dengan gerakan Islam *mainstream*, tetapi mereka adalah kelompok yang sangat aktif dalam menyuarakan kepen-

<sup>12</sup> ES. Soepriyadi, "Ngruki & Jaringan Teroris", Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003, hlm. 100.

<sup>13</sup> Alip Purnomo, *FPI Disalahpahami*, Jakarta: Mediatama Indonesia, 2003, hlm. 9-10.



tingan-kepentingannya. Sehingga gaung yang berkembang menjadi pengaruh politik ini berdampak sangat terasa secara nasional. Aksi-aksi demonstrasi, rapat akbar, penyerangan terhadap tempat maksiat, latihan militer, *sweeping* hingga pengiriman pasukan jihad dalam konflik bersenjata mereka lakukan untuk memperjuangkan cita-citanya.

Isu-isu seperti pengembalian “tujuh kata Piagam Jakarta”, formalisasi syari’at Islam, Perda syari’at Islam, anti kemaksiatan, anti Kristenisasi, aksi solidaritas dunia Islam, jihad Maluku dan Poso menjadi prioritas utama kelompok ini. Di

antara isu-isu ini isu Piagam Jakarta menempati posisi tersendiri. Piagam Jakarta telah menarik perhatian sejumlah besar ormas Islam. Dukungan ini diawali oleh unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syari’at Islam) Sulawesi Selatan. Mereka menuntut Pasal 29 UUD 1945 diubah dengan memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta. KPPSI menghendaki agar Syariat Islam diberlakukan di Indonesia. Mereka juga menuntut segera menerbitkan peraturan yang mengatur pemberlakuan syariat Islam di Sulsel.<sup>14</sup> Umar Basalim, “Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era

<sup>14</sup> Umar Basalim, “Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi”, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002, hlm. 144.

Reformasi”, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002, hlm. 144.

Dukungan yang sama juga dilakukan oleh PPMI (Persatuan Pekerja Muslim Indonesia) pimpinan Eggi Sujana, FMI (Front Mahasiswa Islam), sebuah Front gabungan 16 universitas, Hammas (Himpunan Mahasiswa Antar Kampus), Garis (Gabungan Reformis Islam), Laskar Jihad Ansharullah, Front Hizbullah Jakarta dan Laskar Ansharullah Maluku.

Tuntutan serupa juga dilakukan melalui sebuah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan pada 15 Agustus 2000. Ribuan massa berdemonstrasi di depan gedung DPR/MPR menuntut dimasukkannya Piagam Jakarta dalam UUD. Pendukung demonstrasi ini antara lain; FPI (Front Pembela Islam), KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), GPI (Gerakan Pemuda Islam), PII (Persatuan Pelajar Indonesia), HAMMAS (Himpunan Mahasiswa Antar Kampus), PINTAR (Pergerakan Islam untuk Tanah Air), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), DDII (Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), dan IKMAL (Ikatan Keluarga Muslim Internasional).

### Paradigma dan Ideologi

Berbagai ormas baru tersebut memang memiliki platform yang beragam tetapi pada umumnya memiliki visi yang sama

yakni pembentukan “negara Islam” (*dawlah Islamiyyah*) dan mewujudkan penerapan syariat Islam baik dalam wilayah masyarakat, maupun negara. Ada yang menempatkan visi ini sebagai “visi yang disimpan-ditunda” dan ada yang menjadikan visi ini sebagai agenda gerakan saat ini. Meskipun spektrum berbagai gerakan ini cukup luas dan kompleks tetapi secara ideologis, kelompok ini secara keseluruhan menganut paham “salafisme radikal”, yakni berorientasi pada penciptaan kembali masyarakat salaf (generasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya) dengan cara-cara keras dan radikal. Bagi mereka Islam pada masa kaum salaf inilah Islam yang paling sempurna, yang masih murni dan bersih dari berbagai tambahan atau campuran (*bid'ah*) yang dipandang mengotori Islam. Radikalisme religio-historis ini diperkuat dengan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara harfiah.<sup>15</sup>

Gerakan berbagai organisasi ini lebih bercorak konfrontatif terhadap sistem sosial dan politik yang ada. Gerakan ini hendak mengubah secara mendasar sistem yang ada saat ini (yang mereka sebut sistem sekuler atau “jahiliah moderen”). Sebagai gantinya adalah sistem Islam (*nidzam Islami*). Agenda *iqamah daulah islamiyyah* (mendirikan negara Islam) dan formalisasi syariat Islam merupakan muara dari semua aktifitas gerakan ini.

Kemunculan model gerakan baru ini

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, “Kelompok Radikal Muslim” dalam *Tempo*, Edisi 26 Mei-1 Juni 2003, hlm. 52

merupakan anti tesa terhadap gerakan Islam akhir 1970-an hingga pertengahan 1990-an. Pada masa itu, prinsip-prinsip gerakan, pendekatan, modus artikulasi pemikiran dan aksi politik Islam sudah mengalami perubahan cukup penting dibanding masa awal Orde Baru. Sebagai akibat sikap represif pemerintah Orde Baru terhadap Islam, sejumlah intelektual dan aktor gerakan Islam mengubah pemikiran dan aksi politiknya, yang tidak lagi legalistik-formalistik dan konfrontatif.

Pendekatan ini dimaksudkan untuk membangkitkan kembali potensi umat dan menumbuhkan simpati pemerintah terhadap Islam dengan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara Islam dengan negara. Dengan kata lain, generasi baru ini mencari pola relasi agama (Islam) dan negara yang lebih harmonis dan tidak saling curiga. Itulah sebabnya, dalam dekade tersebut, terjadi pergeseran orientasi di kalangan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, kaum intelektual, dan termasuk aktivis partai Islam. Generasi baru yang disebut "intelektual baru Islam" menempuh strategi kultural dengan memproduksi wacana politik Islam yang inklusif<sup>16</sup> dan substansialistik.

Gerakan Islam yang substansialis-

inklusif ini berhasil membuat hubungan harmonis dengan rezim Orde Baru yang ditandai dengan sejumlah kebijakan politik pemerintah yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Antara lain kebijakan mengenai Undang-undang Pendidikan Nasional (1988), Undang-undang Peradilan Agama (1989), berdirinya ICMI (1990), Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Efektivitas Pengumpulan Zakat (1991), dan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah P & K tentang diizinkan Pemakaian Jilbab bagi pelajar putri.<sup>17</sup>

Namun di masa transisi ini, "gerakan Islam baru" mengembalikan model gerakan politik lama dengan ciri yang tidak akomodatif, militan, dan konfrontatif. Ia kembali menampakkan diri sebagai kekuatan daya tekan (oposisi) kepada rezim baru yang menurut mereka tidak aspiratif terhadap Islam. Hal ini tampaknya masuk akal karena adanya indikasi kuat bahwa eksponen gerakan Islam lama yang memiliki kecenderungan keras seperti Persis dan sayap keras Muhammadiyah juga menjadi pendukung "Gerakan Islam baru" ini. Sebagian tokoh dua ormas Islam ini menjadi tokoh-tokoh penting

<sup>16</sup> Sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi juga sekiranya akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia. Karena sejatinya agama dalam keasliannya tidak memaksakan atau memperjuangkan suatu sistem sosial-politik yang eksklusif. Lihat Nurcholis Madjid, "Cita-cita Politik Islam Era Reformasi", Jakarta: Paramadina, 1999, hlm. 52 dan 55.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

dalam organisasi-organisasi baru ini. Demikian juga, sebagian simpatisan dan anggota organisasi baru tersebut berasal dari Persis dan Muhammadiyah.

Kelompok ini kembali memperjuangkan agenda lama seperti penerapan syariat Islam. Isu menonjol yang mereka angkat adalah pemberlakuan kembali Piagam Jakarta ketika proses amandemen UUD 1945 berlangsung. Piagam Jakarta adalah bagian penting dari tuntutan formalisasi syariat Islam karena ia memberikan pijakan konstitusi. Meskipun tuntutan ini gagal di DPR-MPR, niatan serupa diperjuangkan di tingkat daerah melalui agenda Islamisasi Peraturan Daerah. Organisasi-organisasi baru ini—bersama kelompok seide—membentuk berbagai komite penegakan Syariat Islam di beberapa daerah; Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Jawa Barat (Garut, Cianjur dan Tasikmalaya) dan Pamekasan Madura.

Watak keberagamaan demikian tentu saja menimbulkan berbagai benturan dengan kelompok keagamaan *mainstream*. Posisi Islam radikal semakin tampak berseberangan dengan Islam moderat di masa transisi ini. Secara politik perselisihan ini terlihat jelas dalam pergumulan baik dalam aras wacana yang dilontarkan oleh ormas maupun dalam pertarungan di

parlemen dalam isu Piagam Jakarta. Tampak tokoh-tokoh ormas *mainstream* macam NU dan Muhammadiyah berpolemik sengit dengan para tokoh gerakan Islam revivalis seperti Laskar Jihad, MMI, Hizbuttahrir, FPI dan sebagainya. Sementara itu, PAN dan PKB dibantu Golkar dan PDIP beradu kuat melawan PPP, PBB, dan sebagainya.

Kemunculan “gerakan Islam Baru” pasca keruntuhan rejim Orba ini menandai kemunculan kembali corak gerakan Islam lama yang oleh Mochtar Mas’oed disebut “Islamisasi negara”. Yakni perjuangan politik demi berlakunya syariat Islam secara formal dalam sebuah negara Islam dengan cara-cara konstitusional melalui partai Islam maupun cara inkonstitusional seperti perebutan kekuasaan dengan mobilisasi massa atau dengan jalan pemberontakan bersenjata.<sup>18</sup> Paradigma yang dianut adalah “berangkat dengan agama untuk menyelesaikan masalah bangsa”<sup>19</sup> dengan agenda “Islamisasi negara demi Islamisasi masyarakat”.<sup>20</sup> Strategi ini nyaris hilang pada masa “kemesraan” antara umat Islam dan Orde Baru. Cara-cara perjuangan politik yang ideologis-oposisional digantikan dengan melunaknya tuntutan para aktivis politik Islam. Sebagian besar ormas representasi “gerakan Islam Baru” serta partai-parti Is-

<sup>18</sup> Arief Afandi ed., “Islam Demokrasi Atas Bawah, Polemik Setrategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amin Rais”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 76-77.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 10.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 76.

lam kembali menghidupkan strategi ini.

Namun dalam tubuh gerakan revivalisme Islam ini terdapat kelompok yang menempuh strategi lain yakni "Islamisasi negara" yang non-konvensional. Kelompok ini adalah gerakan Tarbiyah yang secara politik diwadahi oleh PK. Kelompok ini tetap bercita-cita mewujudkan kehidupan yang Islami tetapi tidak secara serta-merta ingin mendirikan Negara Islam dalam pengertian yang konvensional. Tetapi ia memasukkan unsur-unsur dakwah Islam dan nilai-nilai Islam dalam berbagai UU yang ada. Hal ini terlihat dalam sikap politik yang tidak *ngotot* dalam isu Piagam Jakarta. Justru PK tampil ke depan dalam mendukung UU Sisdiknas



yang mengakomodir unsur dakwah Islam. Dalam istilah Mochtar, strategi ini disebut "Islamisasi masyarakat dalam negara nasional".<sup>21</sup> Strategi yang ditempuh PK hampir sama dengan arus utama di Muhammadiyah.

Secara umum, yang menjadi prinsip utama organisasi-organisasi revivalis Islam baru, adalah bahwa Islam adalah sebuah sistem kehidupan yang kompleks dan menyeluruh. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dipahami secara sempit hanya sebagai seperangkat aturan ritual semata.

Umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Mereka juga harus melakukan dakwah untuk mengajak orang lain agar menerapkan ajaran-ajaran Islam tersebut. Maka setiap muslim punya kewajiban untuk berupaya menjalankan seluruh sisi kehidupan berdasarkan Islam.

Cara pandang yang holistik ini, melahirkan konsep bahwa Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Islam adalah *din wa daulah*. Wilayah Islam juga meliputi politik atau negara. Maka dalam paradigma ini negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Konsep ini juga terkait dengan konsep kedaulatan di tangan Allah (*al-hakimiyatu lillah*). Bahwa kedaulatan berasal dari Allah dan berada di tangan-Nya. Oleh karena itu, seluruh proses sosial politik harus dikembalikan kepada aturan-aturan Allah. Dengan demikian Al-Qur'an dan Sunnah merupa-

<sup>21</sup> Ibid.

kan supremasi satu-satunya dalam kehidupan.

Oleh karena itu, syariat Islam harus diterapkan dalam setiap sisi kehidupan. Dari ekonomi, politik, budaya, militer hingga nilai-nilai hidup sehari-hari. Maka seluruh undang-undang dan perangkat hukum harus berlandaskan Islam. Maka syari'at harus menggantikan hukum buatan manusia.

Jika menggunakan lima tingkatan penerapan (formalisasi) syariat Islam,<sup>22</sup> bagi HTI, MMI, Laskar Jihad formalisasi syari'at haruslah dilakukan hingga tingkat yang terakhir. Syariat Islam harus diterapkan untuk semua bidang hingga negara benar-benar menjadi negara Islam. Sementara itu, sejauh yang bisa diamati, kalangan Tarbiyah (PKS) tidak secara tegas mengemukakan perlunya formalisasi syari'at. Tampaknya, mereka lebih menghendaki untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional yang ada tanpa membawa simbol-simbolnya. Kalangan *mainstream* Tarbiyah lebih senang dengan objektifikasi syariat Islam.

### Agenda dan Model Islamisasi

Corak Islam di Indonesia sejak 1980-an telah menjadi embrio bagi tumbuhnya gerakan Islamisme kontemporer. Semangat kebangkitan Islam di Timur

Tengah, terutama pasca Revolusi Islam Iran 1979 telah membawa dampak yang luar biasa bagi gerakan Islamisme di Indonesia. Perubahan politik yang terjadi sejak 1980-an telah membuka pintu yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh rezim Orde Baru. Maka, di era 1990-an lahirlah berbagai kebijakan Orde Baru yang memihak Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam, pendirian Bank Muamalat, ICMI, dll. Meskipun kelompok-kelompok garis keras, seperti Darul Islâm dan Warsidi disikapi oleh rezim Orde Baru dengan represif, namun ada perkembangan baru bagi proses Islamisasi di Indonesia dalam bentuk masuknya Islam ke dalam hukum nasional. Tahapan Islamisasi yang terjadi ketika itu, bagi kelompok Islam dianggap sangat maksimal karena Islam di Indonesia menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Juga, watak Islam yang selalu dipahami sebagai agama politik, sehingga Islamisasi negara menjadi tujuan akhir dari gerakan Islamisme.

Gerakan Islamisme di Indonesia sejak 1999 baru menemukan jati diri politiknya setelah berbagai partai Islam dan kelompok Islam bermunculan seiring dengan dibukanya kebebasan politik. Jika di zaman Orde Baru, gerakan Islamisme hampir tidak bisa muncul ke permukaan akibat sikap represif rezim penguasa, maka

---

<sup>22</sup> Dikenal ada lima tingkatan mengenai hubungan antara Islam dengan negara. Tingkat pertama, formalisasi syari'at Islam (partikular) untuk hukum keluarga; kedua, untuk hukum mu'amalah atau akhwal syakhsyah (perdata); ketiga, untuk ibadah mahdhoh; keempat, untuk hukum pidana (jinayah); kelima, Islam menjadi dasar negara.

di era kebebasan berpolitik gerakan Islamisme terkadang menjadi suatu alternatif. Di kampus-kampus, komunitas masyarakat pinggiran, dan lembaga keagamaan baru, gerakan Islamisme tumbuh secara baik sebagai gerakan alternatif.

Dalam konteks inilah, gerakan Islamisme sesungguhnya tetap memainkan peranannya dalam mengagendakan Islamisasi struktural yang diwujudkan dalam bentuk mengubah tatanan sosial politik; bentuk negara, hukum negara, pelebagaan kenegaraan, dll. Model Islamisasi ini terbagi dalam dua tipologi. Yakni, (1) Islamisasi secara total dengan mengembalikan sistem politik ke zaman kekhalifahan Islam: Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyyah. Islamisasi ini bersifat internasional (global); bisa disebut Islam internasional/Islam politik global. Di Indonesia, barangkali hanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang masih memiliki pandangan Islamisasi politik global dalam bentuk kekhalifahan Islam. (2) Islamisasi yang masih mempertimbangkan *nation-state*, negara bangsa Indonesia, sehingga tidak perlu melakukan Islamisasi politik global kekhalifahan, melainkan cukup membentuk negara Islam Indonesia. Konsep ini yang menjadi anutan dari kebanyakan gerakan Islamisme, seperti Laskar Jihad (Forum Komunikasi Ahlus-sunah Waljamaah/FKASWJ), Front Pembela Islam (FPI), Ikhwanul Muslimin, dll.

Namun yang menjadi titik temu dari berbagai gerakan Islamisme di Indonesia

adalah perjuangan penegakkan syariat Islam. Semua gerakan Islamisme mencoba memperjuangkan penegakan syariat Islam di Indonesia, baik secara total memperjuangkan kembali Piagam Jakarta maupun memasukkan syariat Islam ke dalam perundang-undangan nasional.

Jika dilihat dari pendekatan isi/muatan/konten Islam, ada dua kategorisasi yang sedang dilakukan oleh gerakan Islamisme di Indonesia. *Pertama*, Islamisasi eksklusif-simbolik, yakni Islamisasi yang dilakukan dengan pemaknaan eksklusif, sehingga memiliki watak yang simbolik. Dengan kata lain, Islam dimaknai secara skriptural, leterlek, harfiyah, yang tidak mempertimbangkan aspek kontekstualitas, sehingga Islam harus dimaknai sebagai agama politik, yakni harus diterapkan oleh negara. Islam dan negara bersifat integralistik sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dalam hal ini, Islam resmi menjadi agama negara yang “menaklukan” dan “menguasai”. Islamisasi eksklusif-simbolik muncul dalam tiga bentuk:

1. Perjuangan kembali ke Piagam Jakarta. Tujuh kata yang dibuang dalam Pancasila sila pertama yang bunyinya, “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diperjuangkan untuk dinyatakan dalam Amendemen UUD 1945. Inilah Islamisasi yang paling diinginkan oleh gerakan Islamisme, karena dengan Piagam Jakarta berarti penegakkan syariat Islam memiliki payung hukum yang sangat kuat. Namun perjuangan ini tidak berhasil karena mayoritas anggota DPR RI menolak pencan-

tuman kembali Piagam Jakarta.

2. Memasukkan muatan syariat Islam ke dalam perundang-undangan nasional, seperti yang terlihat dalam UU Pendidikan Nasional, Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU KUB), Revisi KUHP, pendirian Bank Syariah, dan produk perundang-undangan nasional lainnya. Usaha inilah yang pernah berhasil, dengan keluarnya UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendirian Bank Muamalat, dll.

3. Masuknya syariat Islam ke dalam peraturan pemerintah daerah atau sering disebut Perda Syariah, seperti yang terlihat dari Raperda Cianjur, Tasikmalaya, Garut, Makasar, Pamekasan, dll. Tampaknya, jalur masuknya syariat Islam ke daerah cukup efektif dengan keluarnya peraturan hukum yang dibuat Gubernur untuk proyek Islamisasi masyarakat daerah. Simbol-simbol Islam, seperti papan nama dan jalan disemarakkan dengan simbol Islam, busana muslimah, dll menjadi bagian dari penegakkan syariat Islam di daerah. Di Cianjur misalnya, sudah diresmikan Gerbang Marhamah yang didahului oleh ikrar umat Islam Kabupaten Cianjur untuk menegakkan dan mengamalkan syariat Islam secara bertahap tanggal 1 Muharram 1422 H/28 Maret 2001<sup>23</sup>, yang bertujuan untuk membuat kehidupan masyarakat Cianjur

penuh dengan akhlakul karimah Islam. Para pelakunya adalah mereka yang serius dengan penegakkan syariat Islam, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah maupun gerakan Islamisme, yang sebenarnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Perda Syariah di daerah sejatinya adalah permainan pemerintah untuk menjinakkan umat Islam agar tidak melakukan kontrol, pengawasan dan aksi-aksi yang menjurus pada praktik pembangkangan.

*Kedua*, Islamisasi “inklusif-strategis”, yakni Islamisasi yang dilakukan tidak secara literal-simbolik, tetapi lebih banyak



<sup>23</sup>Mewujudkan Gerbang Marhamah sebagai cermin Akhlak Publik, ceramah Bupati Cianjur pada acara Seminar Sehari Tafakur demokrasi tanggal 28 Mei 2004 di Gedung DKC Cianjur, hlm. 1.

dilakukan secara inklusif. Islam tidak dimaknai secara skriptural, tetapi Islam dimaknai secara inklusif. Inilah yang dilakukan PKS dalam mengembangkan model Islamisasinya dengan menggunakan isu-isu seperti pemberantasan korupsi, menolak gaya hidup mewah, toleransi, dll yang dijual ke masyarakat. Namun, Islamisasi ini bisa bergerak ke arah yang simbolik-eksklusif, jika secara politik PKS berkuasa.

### Strategi Politik PKS

Islam di Indonesia tidak pernah dilepaskan dari kancah politik, baik politik kekuasaan maupun politik kultural. Ini terlihat dari sejarah panjang bangsa Indonesia yang melibatkan Islam sebagai agama mayoritas dalam perjuangan bangsa. Tak heran jika Islam memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada partai Islam, ormas Islam, dan komunitas Islam yang beragam sebagai aset bangsa yang luar biasa.

Namun sejak Pemilu 1999-2004 telah terjadi perubahan besar dalam kancah Islam dan kebangsaan di Indonesia, terutama partai Islam yang terlibat dalam kancah politik kekuasaan. Yakni, mulai berubahnya orientasi Islam politik di Indonesia; dari yang selama ini berorientasi formalistik-pragmatis menuju inklusivistik-pragmatis. Hal ini dapat kita lihat dari perjalanan politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejak Pemilu 1999, yang sudah meninggalkan orientasi formalistik-pragmatis yang sekadar mengusung

perjuangan syariat Islam ke dalam hukum nasional demi tujuan pragmatis untuk menarik simpati masyarakat Muslim.

Memang, selama ini ideologisasi politik Islam lebih banyak berorientasi formalistik-pragmatis, sehingga tidak dapat menerjemahkan karakteristik keindonesiaan yang beragam dan kebutuhan dasar masyarakat. Sejak Pemilu 1955, partai-partai Islam tampaknya tidak mampu menjawab problem kemasyarakatan secara riil. Lihat saja pengalaman politik Masyumi (Parmusi), PSII, dan Partai NU di Pemilu 1955-1971, PPP, PBB, PKU, PUI, PNU, Partai SUNNI, PSII, PSSI 1905, dan PPIM di Pemilu 1999, dan PPP, PBB, PBR, dan PPNU di Pemilu 2004.

Dalam empat Pemilu; 1955, 1971, 1999, dan 2004, Islam sebagai ideologi partai tampaknya masih melekat dalam program-programnya, sehingga yang diperjuangkan adalah kembalinya Piagam Jakarta atau penegakkan syariat Islam. Hingga sekarang PPP dan PBB masih menggunakan isu-isu Islam sebagai daya tarik untuk menjaring massa. Kedua partai ini belum mampu melakukan perubahan besar dalam platform politiknya agar menjadi partai yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, yang berbeda etnis, agama, dan golongan.

Inilah bedanya PKS. Meski sebagai partai Islam, PKS tidak terpaku pada program-program eksklusifnya, terutama pada isu perjuangan formalisasi syariat Islam. Justru PKS melakukan perubahan besar dalam orientasi politiknya dengan meneco-

ba melakukan interpretasi Islam kontekstual. Karena itulah, isu-isu yang dijual ke publik bukan Piagam Jakarta atau penegakkan syariat Islam, melainkan isu pemberantasan korupsi, kesejahteraan ekonomi, dan anti gaya hidup mewah.

Jerih payah yang telah dilakukan selama lima tahun tampaknya membuahkan hasil luar biasa. PKS mampu menyodok di posisi keenam dengan perolehan suara yang cukup signifikan, lebih dari 7 persen. Bahkan, di DKI Jakarta, PKS tampil sebagai pemenang. Tampaknya, PKS sebagai partai Islam yang mengandalkan kader-kader mudanya mampu membangkitkan optimisme bagi partai-partai Islam yang terpuruk di Pemilu 2004, sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi keberlangsungan Islam politik di masa depan. Meskipun perolehannya belum mampu menandingi partai-partai sekuler, seperti Partai Golkar dan PDI-P, PKS sangat diperhitungkan dalam pentas politik nasional sekarang ini.

Tampaknya ada fenomena kebangkitan Islam politik yang direpresentasikan PKS di Pemilu 2004. Tentu saja dengan format baru, yakni Islam politik yang program-programnya tidak eksklusif Islam, tetapi lebih banyak menawarkan program-program yang lebih inklusif, seperti pemberantasan korupsi, kesejahteraan ekonomi, pelayanan umum, dll.

PKS ini perlu diwaspadai agar perilakunya bukan basa-basi politik yang sifatnya jangka pendek. Atau dengan kata lain, bukanlah strategi politik untuk meraih kekuasaan belaka, melainkan

sebuah visi dan paradigma baru Islam politik di Indonesia. Karena yang kita butuhkan sekarang ini adalah paradigma politik Islam yang substansialistik; yakni Islam *rahmatan lil 'alamin* (Islam untuk semua umat). Jika apa yang dilakukan PKS hanyalah strategi politik untuk memenangkan pemilu, maka umat Islam dalam berpolitik berarti tidak mengalami perubahan mendasar. Sebab, ketika PKS sudah menguasai kekuasaan kelak, maka apa yang akan mereka lakukan sama persis dengan apa yang diperjuangkan PPP dan PBB; yakni memperjuangkan formalisasi syariat Islam atau Piagam Jakarta. Mereka sudah tidak lagi memperjuangkan agenda demokratisasi, pemberantasan korupsi, dan penegakkan HAM.

Pengalaman PAS (Partai Islam se-Malaysia) di Malaysia patut menjadi renungan buat kader-kader PKS. Pada Pemilu 1999, PAS berhasil meraih kemenangan besar di dua wilayah, yakni Kelantan dan Trengganu. Semuanya ini dilakukan karena PAS berhasil membuat program politik yang jelas dan inklusif, yakni mengkampanyekan gerakan reformasi dan pemberantasan korupsi. Sebab, isu itulah yang sedang dibutuhkan masyarakat Malaysia untuk mengurusi krisis ekonomi yang menimpa negeri Jiran itu. Namun, setelah memenangkan Kelantan dan Trengganu, PAS justru mengeluarkan kebijakan politik yang eksklusif dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakatnya. Mereka memperjuangkan formalisasi hukum hudud di dua wilayah yang dikuasainya. Sementara itu, kemiskinan,

kemelaratan, dan kurangnya fasilitas umum di Kelantan dan Trengganu menjadi persoalan pelik yang tak kunjung usai terselesaikan. Akibatnya, di Pemilu 2004 kemarin PAS menderita kekalahan di Trengganu dan hanya menang tipis di Kelantan.<sup>24</sup>

Semuanya ini terjadi karena PAS tidak lagi mengkampanyekan isu-isu strategis yang dibutuhkan masyarakat, mereka malah memperjuangkan isu-isu yang tidak begitu populer di masyarakat, seperti hukum hudud dan rajam. Karena itulah, PKS harus mengambil pelajaran yang amat berharga terhadap apa yang terjadi di Malaysia, jika ingin tetap dipilih masyarakat di Pemilu 2009. Di sinilah PKS diharapkan dapat konsisten memperjuangkan isu-isu Islam yang sangat dibutuhkan masyarakat luas.

Sebagaimana dikemukakan Olivier Roy (2003), kegagalan Islam politik lebih banyak disebabkan oleh imajinasi politik yang diperjuangkan tidak mampu menja-

wab kebutuhan masyarakat. Sehingga Islam politik di mana pun (Timur Tengah dan Asia Tenggara) tidak mampu menjadi kampion bagi terselesaikannya persoalan-persoalan kemasyarakatan, seperti kesejahteraan ekonomi, pengangguran, pengusuran, kemiskinan, korupsi, dan pengekangan HAM.

Barangkali dengan berpijak dari sekian kegagalan yang telah dilakukan oleh partai-partai Islam, PKS harus tetap menjaga orientasinya yang lebih bersifat inklusif, bukan malah mengubahnya menjadi eksklusif dan sektarian. Bukankah Islam politik harus berubah sesuai dengan konteks zamannya. Bagi partai-partai Islam yang lain, sudah sepantasnya mereka berjiwa besar untuk meniru keberhasilan PKS dalam mengelola isu dan membuat platform politik yang lebih jelas, inklusif, dan berkeadilan. Semoga fenomena keberhasilan PKS, bukan basa-basi, tetapi memang menjadi visi dan paradigma politiknya. ❖



<sup>24</sup> Wawancara dengan Chandra Muzaffar di Kantor Just Kualalumpur tanggal 6 April 2004